

PEMIKIRAN MANGKUNAGARA IV TENTANG KETATAPRAJAAN (1856-1871)

Oleh: Dhanang Respati Puguh

Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Diponegoro

ABSTRACT

The purpose of this research is to discuss the governmental thought of Mangkunagara IV from the intellectual history perspective. Pursuant to his capacity as a ruler of Mangkunagaran and a poet, Mangkunagara IV had produced his thought on the government that was poured in serat-serat piwulang. The governmental thought of Mangkunagara IV gave emphasis on three main aspects in a state, such as king, army commander, and soldier, that each of them emphasized on each of their status, task, and duty. Contextually, the governmental thought connected to the condition of the Mangkunagaran in the age of Mangkunagara IV. At the time, Mangkunagara IV was ordering the government, economy, and military. His governmental thought in serat-serat piwulang were truly the ethic foundations to support his on going policies. In other words, through serat-serat piwulang, Mangkunagara IV purposed to give understanding to the whole components and exponents of the Mangkunagaran, especially the santanas and naraprajas, in order that his policies were supported and done with full responsibilities in line with their status and duties.

Keywords: Mangkunagara IV, the governmental thought, *Laksitaraja*, *Nayakawara*, *Wirawiyata*, *Tripama*.

I. PENDAHULUAN

Kerajaan Mataram Islam yang didirikan oleh Panembahan Senapati pada tahun 1575, berhasil mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Sultan Agung yang bertahta dari tahun 1613 sampai dengan 1645. Pada saat itu wilayah kekuasaannya meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat. Namun, pada masa pemerintahan yang menggantikannya tampak adanya kemunduran. Aneksasi-aneksasi yang dilakukan oleh Belanda sebagai imbalan terhadap pertentangan-pertentangan internal di dalam kerajaan, secara berangsur-angsur menyempitkan wilayah kekuasaan kerajaan.¹

Dengan ditandatanganinya Perjanjian Giyanti 13 Pebruari 1755 wilayah kerajaan Mataram semakin menyempit, karena wilayah kerajaan Mataram dipecah menjadi dua bagian, yaitu kera-

jaan Surakarta dan Yogyakarta yang masing-masing di bawah kekuasaan Sunan Pakubuwana III dan Sultan Hamengkubuwana I.² Selanjutnya pada tahun 1757 wilayah kerajaan Surakarta juga dipecah menjadi dua dengan kemunculan kekuasaan Mangkunagara, dan pada tahun 1812 hal serupa terjadi pula di kerajaan Yogyakarta karena adanya kekuasaan Pakualam.³

Pembagian kerajaan yang mengakibatkan penyempitan wilayah kerajaan, secara politis dan ekonomis dapat dipandang sebagai penyusutan kekuasaan raja. Akan tetapi, secara kultural kekuasaan raja sebagai pengayom kebudayaan Jawa tidak mengalami penyusutan. Oleh karena itu, setelah terjadinya penetrasi kolonial Belanda dalam bidang politik dan ekonomi perhatian raja lebih diarahkan pada pengembangan bidang kebudayaan.⁴ Hal ini tampak jelas terjadi di Kasunanan Surakarta.

Sebagai akibat dari adanya penyusutan kekuasaan politik dan ekonomi, kehidupan keraton Surakarta lebih dicurahkan dalam bidang kebudayaan, yaitu dengan pengembangan kehidupan rohani yang mencakup etika, bahasa, kesusastraan, dan kesenian yang terpan-tul dalam perkembangan kesusastraan Jawa pada abad ke-18 dan 19. Nama-nama seperti Raden Ngabehi Yasadipura I, Raden Ngabehi Yasadipura II, dan Raden Ngabehi Ranggawarsita adalah pujangga-pujangga keraton yang berperan mengemban tugas mengembangkan kesusastraan Jawa dan kebudayaan keraton pada masa itu dengan hasil yang sangat gemilang. Pigeaud menyebut periode itu sebagai masa "renaissance kesusastraan Jawa klasik".⁵ Dengan demikian ada hubungan antara penyusutan kekuasaan politik dan ekonomi dengan memuncaknya perkembangan kebudayaan keraton.

Dalam periode yang berlangsung selama kurang lebih 125 tahun itu, banyak karya sastra Jawa dihasilkan. Selain karena keindahan bahasanya, karya itu dijunjung tinggi oleh masyarakat Jawa karena sifatnya yang didaktis dan religius. Maka dari itu, tidak mengherankan karya-karya yang diciptakan pada periode tersebut juga dikenal sebagai *sastra piwulang*.⁶ Ada juga beberapa kesusastraan yang melambangkan pandangan yang bersifat sinkretis, yaitu pandangan yang menunjukkan adanya keterkaitan nilai-nilai budaya Jawa tradisional dengan unsur-unsur agama Islam.

Berbeda dengan keraton Surakarta yang merupakan sentra kegiatan kesusastraan Jawa pada abad ke-18 dan 19, istana Mangkunagaran sama sekali tidak menunjukkan kondisi seperti itu. Walaupun dalam bidang kesusastraan tidak menampakkan kondisi seperti yang terjadi di Kasunanan Surakarta, tidak berarti istana Mangkunagaran

tidak menaruh perhatian pada kehidupan kebudayaan. Ketika Mangkunagara I memegang pucuk kekuasaan Mangkunagaran, kegiatan seni tari dan seni *karawitan* telah diadakan. Tarian perang-perangan dengan menggunakan tombak, keris, tameng, panah dan busurnya yang kemudian disebut *wireng*, merupakan salah satu jenis tarian yang menonjol dan merupakan bagian penting dalam hiburan di istana.⁷ Hal ini disebabkan oleh karena tarian tersebut menggambarkan sikap kesatria-an dan kepahlawanan yang tentunya sangat sesuai dengan perjuangan Raden Mas Said dalam mendirikan praja Mangkunagaran.

Di Mangkunagaran kegiatan dalam bidang kesusastraan baru terlihat dengan jelas pada masa pemerintahan Mangkunagara IV. Ia adalah seorang yang berhasil mengantarkan praja Mangkunagaran mencapai puncak kejayaan dan sekaligus menjadikannya sebagai pusat kegiatan kesusastraan kedua di Surakarta, pada pertengahan hingga menjelang akhir abad ke-19.

Sebagai pemimpin yang berwasan luas, Mangkunagara IV (1853-1881) berjasa di berbagai bidang dalam sejarah perkembangan Mangkunagaran. Sebagai negarawan ia menerapkan sistem pemerintahan dan sistem perekonomian moderen bagi keprajaannya. Dengan memperbaiki sistem administrasi, pertanian, dan irigasi serta mendirikan perusahaan, ia berhasil memperkuat perekonomian Mangkunagaran dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.⁸

Satu hal yang tidak kalah pentingnya dari kemajuan dalam bidang perekonomian adalah kemajuan dalam bidang kebudayaan. Di samping sebagai negarawan, Mangkunagara IV juga dikenal sebagai pujangga yang telah menghasilkan puluhan karya sastra. Dengan karya-karyanya itu, ia telah memperkaya khasanah kesusastraan

Jawa. Jika Raden Ngabehi Rangga-warsita disebut sebagai pujangga penutup dari keraton Surakarta, maka Mangkunagara IV adalah seorang pujangga terakhir dari periode "renaissance kesusastraan Jawa klasik".⁹

Mangkunagara IV juga memiliki perhatian yang besar dalam pengembangan seni tari Jawa di Mangkunagaran. Ia juga telah menyumbangkan *gendhing-gendhing* ciptaan baru bagi dunia seni *karawitan* Jawa. Sebagai pecinta seni ia telah memberikan bantuan kepada para penulis dan seniman.¹⁰ Pendek kata, ia telah membawa perubahan dan perkembangan baru dalam kehidupan kebudayaan di Mangkunagaran. Dengan demikian pada diri Mangkunagara IV ada kombinasi antara pemimpin praja dan pujangga.

Walaupun dari sejarah telah diketahui bahwa Mangkunagara IV adalah seorang pemimpin praja yang membawa Mangkunagaran menuju puncak kemegahan dengan kemajuan-kemajuan dalam perekonomian dan kebudayaan, namun selama ini perhatian sejarawan lebih banyak ditujukan kepada keberhasilannya dalam bidang perekonomian. Tampaknya masih sangat sedikit perhatian sejarawan yang diberikan kepada kepujanggaannya Mangkunagara IV dengan mengkaji pemikiran-pemikiran melalui karya-karyanya, sebagai studi sejarah intelektual.

Atas pertimbangan itulah, maka dalam kesempatan ini penulis mencoba untuk mengangkat pemikiran Mangkunagara IV sebagai topik penelitian dengan memfokuskan pada pemikiran tentang ketataprajaan yang dituangkan dalam karya-karyanya yang berupa *serat piwulang*. Dalam studi ini pembahasan akan ditekankan pada persoalan latar belakang, substansi, dan tujuan dari adanya pemikiran itu.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode sejarah, yaitu seperangkat prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah yang sistematis yang digubah untuk membantu secara efektif dalam mengumpulkan sumber sejarah, menilainya secara kritis, dan merekonstruksinya menjadi cerita sejarah dalam bentuk tertulis.¹¹ Ada pun sumber-sumber yang digunakan terdiri atas sumber primer dan sekunder. Sumber primer berupa arsip-arsip kolonial dan sumber tradisional Jawa (*serat, babad*), sedangkan sumber sekunder berupa artikel dan buku.

III. PEMBAHASAN

3.1. Karier Mangkunagara IV

Mangkunagara IV yang bernama kecil R.M. Sudira, adalah putra ke tujuh P. Hadiwijaya I dengan putri ke dua Mangkunagara II yang berasal dari Kasindurejan. Ia dilahirkan pada 8 *Sapar* 1738 Jawa atau 3 Maret 1811 Masehi di *Dalem Hadiwijayan*, Surakarta.¹²

Sejak lahir R.M. Sudira dipungut sebagai putra oleh Mangkunagara II dan dibawa ke istana Mangkunagaran. Di Mangkunagaran ia diasuh oleh Mbok Ajeng Dayaningsih salah seorang *garwa ampil* Mangkunagara II.¹³ Setelah cukup lama hidup bersama Mangkunagara II, kemudian ia dititipkan kepada kakak sepupunya R.M. Sarengat atau P. Riya (kelak Mangkunagara III), yang menganggap dirinya sebagai putra pertama karena belum mempunyai keturunan.¹⁴ Seperti putra bangsawan lainnya, ia menjalani proses pendidikan yang penuh dengan ajaran moral dalam nuansa budaya Jawa tradisional. Ia diberi pelajaran menulis

dan membaca karya sastra Jawa dari para pujangga besar.¹⁵ Selain etika dan kebudayaan Jawa, ia juga diberi pelajaran agama Islam.¹⁶

Berbeda dengan masa kecilnya yang aman terlindung, masa remaja R.M. Sudira dijalannya dalam suasana prihatin. Ia harus melewati masa itu dengan mengabdikan diri, yang merupakan mata rantai dalam proses pendidikan dari putra bangsawan Jawa.¹⁷ Setelah dikhitankan pada usia tiga belas tahun, ia diabdikan ke istana Mangkunagaran, dengan tujuan agar ia dapat belajar berinteraksi dengan orang lain dan lebih mengenal lingkungan sosialnya.

Kariernya dimulai pada tahun 1826, ketika ia dimasukkan oleh P. Riya ke Legiun Mangkunagaran dalam usia lima belas tahun.¹⁸ Bagi R.M. Sudira kehidupan militer yang penuh dengan kedisiplinan adalah ajang untuk menempa diri. Bakat kepemimpinannya mulai terlihat dan orang mulai memperhitungkan kecakapannya. Kesempatan untuk mengembangkan dirinya semakin terbuka ketika meletus Perang Jawa (1823-1830), karena ia diberi tugas mengikuti kakeknya, Mangkunagara II, untuk membendung agar peperangan itu tidak meluas ke Surakarta.¹⁹

Selama berada di medan perang, R.M. Sudira tentunya telah mendapatkan berbagai pengalaman yang berharga bagi hidupnya dan memperluas cakrawala berpikirnya, karena telah memiliki kesempatan untuk berkenalan secara lebih dekat dengan masyarakat dari berbagai golongan. Ia sangat mengenal kehidupan orang-orang desa dengan aktivitas pertaniannya di sawah. Ia juga memiliki kesempatan untuk berkenalan dengan orang-orang Belanda khususnya para perwira dan pegawai. Keberadaannya di berbagai tempat telah mengakrabkan dirinya dengan lingkungan

alam.²⁰ Semua itu telah ikut membentuk karakter dan mentalnya. Kurun waktu ini merupakan masa-masa yang terpenting dalam pembentukan pribadinya sebagai negarawan.

Dengan berakhirnya Perang Jawa, pada tahun 1832, R.M. Sudira ditarik kembali ke Legiun Mangkunagaran. Kemudian ia dinikahkan dengan putri P.A. Suryamentaram, dan sejak itu ia menggunakan nama Gandakusuma.²¹

Setelah berakhirnya Perang Jawa, selain berkiperah dalam bidang kemiliteran R.M. Gandakusuma juga menekuni dunia sastra Jawa. Hal ini dapat dilihat dari persahabatannya dengan para ahli kesusastraan Jawa baik dari kalangan bangsa Jawa maupun Belanda yang pada waktu itu menunjukkan perhatian yang besar dalam studi bahasa dan kesusastraan Jawa, seperti R. Ng. Ranggawarsita, C.F. Winter, J.F.C. Gericke, J.A. Wilkens, A.E. Cohen Stuart, dan D.L. Mounier.²²

Pengangkatan P. Riya untuk menduduki jabatan pimpinan praja Mangkunagaran menggantikan kakeknya Mangkunagara II yang wafat pada tahun 1835,²³ memiliki arti penting bagi kelangsungan karier R.M. Gandakusuma. Ia selalu dipromosikan untuk menduduki jabatan-jabatan strategis, yang memungkinkan untuk menduduki pucuk pemerintahan Mangkunagaran.

Kariernya di pemerintahan dimulai dari jabatan *patih*. Setahun kemudian ia juga diangkat menjadi pembantu terdekat Mangkunagara III sebagai kapten ajudan, sekaligus bertugas mengurus administrasi Legiun Mangkunagaran.²⁴ Pada jabatan itu, R.M. Gandakusuma menunjukkan prestasi yang baik. Atas prestasi itu, Mangkunagara III dan pemerintah Belanda semakin memberikan perhatian terhadap kemampuannya. Suatu yang mudah dipahami, apabila di kemudian hari pada tanggal 17 Mei 1850, karena semangat pengabdian dan

usahanya yang sungguh-sungguh untuk memajukan praja Mangkunagaran, ia diangkat sebagai pangeran dengan gelar P.A. Gandakusuma. Ia bertugas mengurus administrasi praja.²⁵ Pengangkatan ini merupakan jalan untuk menduduki jabatan tertinggi di praja Mangkunagaran.

Kesempatan itu menjadi kenyataan, karena setelah kemangkatan Mangkunagara III, ia diangkat secara resmi oleh pemerintah Belanda menjadi pengganti Mangkunagara III pada 8 Maret 1853.²⁶ Kedudukannya sebagai pemimpin praja Mangkunagaran semakin kuat setelah ia dinobatkan sebagai K.G.P.A.A. Mangkunagara IV, Kolonel Komandan Legiun Mangkunagaran pada 16 September 1857.²⁷

3.2. Praja Mangkunagaran Pada Masa Pemerintahan Mangkunagara IV (1853-1881)

Setelah menduduki pucuk pemerintahan praja Mangkunagaran, sebagai seorang negarawan Mangkunagara IV kemudian mengambil inisiatif untuk melakukan kebijakan dalam bidang pemerintahan, perekonomian, dan kemiliteran.

Dalam bidang pemerintahan Mangkunagara IV mengadakan pembaharuan dan penyempurnaan organisasi pemerintahan praja Mangkunagaran yang bertujuan untuk memaksimalkan mekanisme pemerintahan. Ia menerapkan model birokrasi kerajaan yang moderen yang sudah mendapatkan pengaruh dari birokrasi pemerintah Belanda, yaitu dengan membentuk departemen-departemen yang bertugas mengelola suatu bidang tertentu.

Berdasarkan *pranatan* yang diundangkan pada tanggal 11 Agustus 1867 ditetapkan sembilan departemen dalam pemerintahan Mangkunagaran di luar *kasantanan* dan legiun, yang disebut dengan *kawadanan*. Masing-

masing *kawadanan* memiliki tugas yang berlainan dan dipimpin oleh *wadana*. Kesembilan *kawadanan* itu adalah *hamongpraja*, *reksapraja*, *kartapraja*, *martapraja*, *kartipraja*, *reksawibawa*, *mandrapura*, *purabaksana*, dan *yogiswara*.²⁸

Kawadanan-kawadanan itu dibagi dalam urusan pemerintahan di dalam praja (*reh jero*) dan pemerintahan di luar praja (*reh jaba*). Pemerintahan di dalam praja terdiri atas delapan *kawadanan* dan pemerintahan di luar praja hanya terdiri atas satu *kawadanan*. Pola seperti ini mirip dengan struktur birokrasi kerajaan Mataram yang dibagi menjadi dua, yaitu *wadana lebet* dan *wadana jawi*, hanya dengan istilah yang berbeda, serta skala yang lebih kecil. Hal ini disebabkan oleh karena Mangkunagaran pada masa pemerintahan Mangkunagara IV berorientasi kepada tatanan pemerintahan Kasunanan Surakarta.²⁹

Bidang perekonomian juga mendapatkan perhatian dari Mangkunagara IV. Setelah menduduki pucuk pemerintahan praja Mangkunagaran, ia merencanakan untuk membudidayakan tanaman kopi dalam skala yang lebih besar. Untuk merealisasikan gagasan itu, segera dilakukan perluasan pembudidayaan tanaman kopi dengan memanfaatkan lahan-lahan yang sebelumnya tidak digunakan dan membuka lahan-lahan baru dengan cara melakukan penebangan hutan.³⁰

Sejalan dengan langkah-langkah yang telah dilakukan, Mangkunagara IV merencanakan untuk menarik tanah-tanah *apanage* yang berada di tangan penyewa-penyewa Eropa. Oleh karena mendapat tentangan keras dari para penyewa tanah, akhirnya pemerintah Belanda memutuskan bahwa perjanjian penyewaan tanah di Mangkunagaran diperpanjang sampai dengan tahun 1877.³¹

Kegagalan usaha Mangkunagara IV untuk mengakhiri penyewaan tanah *apanage* di Mangkunagaran, mengakibatkan rencananya untuk memperluas penanaman kopi berjalan tidak sesuai dengan harapan. Walaupun demikian, Mangkunagara IV tetap giat untuk mewujudkan keinginannya dan memutuskan untuk menarik tanah-tanah *apanage* para *santana* dan *narapraja*, yang realisasinya secara bertahap baru dapat dilaksanakan pada tahun 1862.

Penarikan tanah *apanage* itu dilakukan secara bertahap dengan menggunakan cara-cara yang berbeda-beda dengan memperhatikan kondisinya. Setelah penarikan tanah-tanah *apanage*, Mangkunagara IV memberikan gaji kepada *santana*, *narapraja*, perwira Legiun Mangkunagaran dalam bentuk uang, yang besarnya disesuaikan dengan luas, kondisi, dan kualitas tanah *apanage*.³²

Setelah dilakukan penarikan tanah *apanage* pada tahun 1862, Mangkunagara IV mulai memanfaatkannya untuk budidaya tanaman kopi. Agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan, pada tahun 1863 Mangkunagara IV mendatangkan seorang ahli dalam bidang pertanian dan perkebunan berkebangsaan Jerman bernama R. Kamp untuk mengorganisasi penanaman kopi di Mangkunagaran.³³ Adanya pengorganisasian yang baik dan ditunjang oleh sistem penanaman modern yang meliputi penggarapan tanah, pemilihan dan pengolahan benih, penanaman pohon pelindung, pemeliharaan tanaman, pemetikan dan penjemuran,³⁴ perkebunan Mangkunagaran berhasil memproduksi kopi dalam jumlah yang cukup besar.

Untuk pemasarannya, berdasarkan Resolusi tanggal 31 Maret 1833 No. 18, produksi kopi Mangkunagaran harus dijual kepada pemerintah Belanda dengan harga 25 gulden tiap *pikul* atau

40,47 gulden tiap kuintal untuk kopi yang berkualitas, dan Mangkunagaran dibebani biaya angkutan sebesar tiga gulden tiap *pikul* atau 4,86 gulden tiap kuintal.³⁵ Sebaliknya apabila kualitas kopi tidak baik, pemerintah Belanda akan mematok harga sesuai dengan kualitasnya. Selama kurang lebih sebelas tahun (1871-1881), perkebunan kopi telah memberikan tambahan pendapatan praja Mangkunagaran sebesar 13.873.149,97 gulden atau rata-rata 1.261.195,4 gulden setahun.³⁶

Selain membudidayakan tanaman kopi, Mangkunagara IV juga memanfaatkan tanah-tanah yang berada di dataran rendah untuk budidaya tebu. Untuk mendukung usaha-usaha yang dilakukan ini, pada tahun 1861 Mangkunagara IV mendirikan pabrik gula Calamadu,³⁷ dan pada tahun 1871 mendirikan pabrik gula Tasikmadu.³⁸

Penghapusan tanah *apanage* yang kemudian diusahakan untuk perkebunan yang dikelola sendiri oleh Mangkunagara IV telah mengakibatkan terjadinya perubahan perekonomian praja Mangkunagaran. Kebijakan itu telah memberikan dampak positif terhadap perkembangan ekonomi praja Mangkunagaran yang dibuktikan dengan adanya peningkatan pendapatan. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa Mangkunagara IV telah berhasil menciptakan kemakmuran di praja Mangkunagaran.

Menurut Houben, strategi ekonomi Mangkunagara IV dapat dipandang sebagai upaya untuk memperbesar kebebasan dan kemandiriannya dengan meniru cara yang dilakukan oleh pemerintah Belanda. Keuntungannya dapat digunakan untuk memperbesar pengaruhnya, tidak saja terhadap kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah lainnya, tetapi juga terhadap Belanda.³⁹

Selain bidang pemerintahan dan perekonomian, Mangkunagara IV juga memiliki perhatian yang besar terhadap

perkembangan kemiliteran. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai usaha yang dilakukannya untuk meningkatkan kualitas para prajurit Legiun Mangkunagaran.

Bersamaan dengan adanya perubahan formasi Legiun Mangkunagaran pada tahun 1859,⁴⁰ Mangkunagara IV melakukan perbaikan pakaian prajurit, melengkapi persenjataan, dan memperbaharui sistem latihan yang dianggap tidak baik.⁴¹ Kekurangan-kekurangan yang terjadi baik yang berkaitan dengan kondisi prajurit maupun peralatan dievaluasi untuk mendapatkan perbaikan. Sebagai contoh, untuk meningkatkan keterampilan prajurit ditambahkan beberapa instruktur perwira.⁴²

Untuk menegakkan kedisiplinan di praja Mangkunagaran, pada tahun 1863 Mangkunagara IV mengeluarkan peraturan bagi prajurit Mangkunagaran yang antara lain berisi tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan dan larangan melanggar ketentuan yang berkaitan dengan kedudukannya sebagai prajurit.⁴³

Berdasarkan Keputusan Gubernur tanggal 6 Agustus 1878 no. 7 secara resmi diadakan reorganisasi terhadap Legiun Mangkunagaran.⁴⁴ Adanya reorganisasi, pendidikan dan latihan menjadi lebih baik dan menunjukkan adanya kemajuan. Sebelum reorganisasi latihan bagi prajurit Legiun Mangkunagaran ditekankan pada baris-berbaris dan menembak, sedangkan latihan bertempur dan dinas lapangan kurang diabdikan. Akan tetapi sesudah reorganisasi, latihan bertempur dan latihan dinas lapangan lebih mendapatkan perhatian, sebaliknya latihan baris-berbaris hanya dilakukan seperlunya saja.

Mangkunagara IV juga sangat memperhatikan aspek perilaku dan mentalitas prajurit Mangkunagaran. Para *abdi dalem* militer dilarang bertingkah laku tidak baik dan bertutur

kata tidak senonoh baik selama maupun tidak sedang bertugas.⁴⁵ Bagi para perwira juga diterapkan sebuah etika militer yang berlaku bagi perwira Legiun Mangkunagaran.⁴⁶ Pembinaan mental juga dilakukan melalui karya-karya Mangkunagara IV yang bertutur tentang keprajuritan, kecintaan kepada tanah air, semangat membela negara, dan lain-lain yang terkandung dalam *Serat Tripama*, *Serat Wirawiyata*, *Serat Yogatama*, dan lain-lain.

Besarnya perhatian dan pentingnya masalah keprajuritan bagi Mangkunagara IV ditunjukkan dalam kebijakannya yang dikeluarkan pada tahun 1880, yaitu bahwa para *kawula* Mangkunagaran yang akan menjadi *narapraja* harus menjadi prajurit Legiun Mangkunagaran.⁴⁷

Dengan memperhatikan kebijakan Mangkunagara IV itu, semakin jelas bahwa Mangkunegara IV bercita-cita untuk menciptakan kemandirian praja Mangkunagaran dalam bidang politik, khususnya menyangkut eksistensinya di hadapan Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Dengan kata lain, Mangkunagara IV mendambakan terwujudnya sebuah kerajaan Mangkunagaran yang berkedudukan tidak berada di bawah tetapi sejajar dengan Kasunanan Surakarta.

3.3. Pemikiran Mangkunagara IV tentang Ketataprajaan

a. Pemikiran tentang Kedudukan dan Tugas Raja

Tidak berbeda dengan konsep kedudukan raja di Jawa, Mangkunagara IV juga menempatkan raja sebagai wakil Tuhan di dunia.⁴⁸ Sesuai dengan kedudukannya sebagai wakil Tuhan di dunia, ia memandang bahwa raja memiliki kekuasaan penuh dan menempati posisi penting dalam negara. Persoalan-

persoalan yang berkaitan dengan ketata-prajaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab raja, karena di tangannya cita-cita dari suatu negara akan dapat diwujudkan. Oleh karena itu, raja memiliki tugas utama yang harus dilaksanakan.⁴⁹

Menurut Moertono, tugas utama raja dalam bidang politik adalah menjaga ketertiban dan ketenangan negara.⁵⁰ Sebagai pemimpin praja, Mangkunagara IV tampaknya memahami benar tentang tugas utama itu. Hal ini dibuktikan dengan adanya rumusan lima tugas pokok yang harus dilaksanakan oleh raja sebagai berikut.

Pertama, menjaga kewibawaan negara. Menurut Mangkunagara IV, kewibawaan sebuah negara dapat terwujud antara lain dengan memiliki prajurit.⁵¹ Dengan memiliki prajurit, raja dapat memperkecil kemungkinan adanya tindakan-tindakan yang dapat mengurangi kewibawaan negara. Prajurit dapat menjaga negara dari timbulnya berbagai hal yang dapat membahayakan keamanannya, dan dapat memberikan perlindungan kepada rakyat.

Persoalan lain yang perlu diperhatikan dalam menjaga kewibawaan negara adalah kemampuan raja dalam mengawasi para pegawainya. Menurut Mangkunagara IV, raja harus mengetahui betul sifat dan perilaku dari para pegawainya. Tanpa mengetahui sifat dan perilakunya, raja akan menghadapi berbagai persoalan yang disebabkan oleh kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan pemerintahan.⁵² Sehubungan dengan hal itu, raja harus senantiasa meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya yang bermanfaat bagi kemajuan negara. Ia juga harus memiliki pegawai-pegawai yang cakap dalam mengurus jalannya pemerintahan.

Berkaitan dengan tugas raja dalam menjaga kewibawaan negara, menurut Mangkunagara IV masih ada satu hal

lagi yang tidak kalah pentingnya dengan kedua hal di atas, yaitu pengambilan kebijakan. Pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan persoalan kenegaraan harus dibicarakan dengan para pelaksana pemerintahan. Pada prinsipnya ada empat hal yang perlu diperhatikan sehubungan dengan pengambilan kebijakan, yaitu: pertama, percaya terhadap hal-hal yang terbukti benar; kedua, mencontoh hal-hal yang baik; ketiga, sesuai dengan peraturan yang berlaku; empat, memilih yang bermanfaat.⁵³ Dengan berlandaskan pada keempat hal yang tampak realistis dan rasional itu, maka pengambilan keputusan akan dapat dijamin kebenaran, kebaikan, dan kemanfaatannya bagi rakyat. Kebijakan-kebijakan yang memberikan manfaat bagi rakyat merupakan kondisi yang kondusif bagi terjaganya kewibawaan sebuah negara.

Kedua, meningkatkan pendapatan negara. Raja bertugas untuk menciptakan kemakmuran bagi negaranya. Untuk mencapai tujuan itu, menurut Mangkunagara IV raja harus meningkatkan pendapatan negara dengan memanfaatkan seluruh potensi yang dimilikinya.

Mangkunagaran sebagai sebuah praja yang bersifat agraris, mau tidak mau harus mendasarkan kehidupannya pada bidang pertanian. Pertanian merupakan satu-satunya bidang yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan praja. Bertitik tolak dari kondisi dan potensi sumber daya alam yang dimiliki, hutan, gunung, dan rawa-rawa harus dimanfaatkan untuk area pertanian dengan membuka sawah dan ladang, serta membuka lahan untuk pemeliharaan ternak. Untuk mendukung usaha pertanian itu perlu dibuat bendungan dan saluran irigasi, yang berfungsi untuk mencukupi kebutuhan air dari tanaman yang dibudidayakan. Pembudidayaan tanaman-tanaman itu

akan memberikan hasil yang dapat meningkatkan pendapatan negara.⁵⁴

Menurut Mangkunagara IV, apabila upaya-upaya untuk meningkatkan pendapatan negara itu telah dilakukan dan menampakkan hasilnya, maka perlu dikelola secara benar. Sekitar 2/3 dari hasil yang diperoleh diserahkan untuk anggaran belanja negara dan 1/3-nya dijadikan sebagai tabungan. Hal ini perlu dilakukan karena kekayaan merupakan jiwa dari sebuah negara.⁵⁵

Ketiga, meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya-upaya konkret untuk mewujudkannya. Menurut Mangkunagara IV, penataan aspek fisik perlu mendapatkan perhatian dalam hubungannya dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Tiap-tiap rumah harus berpagar dan mempunyai selokan yang dapat mengalirkan air pembuangan secara lancar. Hal demikian perlu dilakukan semata-mata untuk menciptakan kebersihan, sehingga akan terhindar dari penyakit.⁵⁶

Mangkunagara IV juga menegaskan perlunya memberikan perhatian kepada rakyat yang hidup dalam kekurangan dan keterbatasan yaitu orang sakit, fakir miskin, orang jompo, dan orang yang tidak memiliki sanak keluarga. Negara harus memberikan bantuan kepada orang-orang papa tersebut dan bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidupnya.⁵⁷

Keempat, menciptakan ketertiban negara. Ketertiban merupakan syarat yang sangat penting bagi kelancaran jalannya pembangunan negara dan terciptanya ketentraman rakyat. Mangkunagara IV mengatakan, bahwa untuk menciptakan ketertiban negara, raja harus dapat menjaga negara dari hal-hal yang dapat mengakibatkan kekacauan. Ia menekankan perlunya upaya-upaya kuratif dalam membasmi penyakit-penyakit masyarakat. Apabila

upaya-upaya untuk membasminya telah dilakukan dan tidak diperhatikan oleh para pelakunya, maka seorang raja berhak untuk menghukum sesuai dengan peraturan negara agar para pelakunya menjadi jera.⁵⁸

Kelima, menjaga keselamatan negara. Sebagaimana sebuah negara moderen, negara tradisional juga harus memiliki tentara yang kuat untuk menjaga keselamatan negara dari ancaman-ancaman baik dari dalam maupun luar negeri.⁵⁹ Mengingat pentingnya kedudukan dan peranan prajurit dalam sebuah negara, menurut Mangkunagara IV raja harus memperhatikan bidang keprajuritan. Perhatian itu ditujukan tidak semata-mata kepada prajurit saja, tetapi juga terhadap sarana pendukungnya.

Selain itu, keselamatan negara dapat diupayakan dengan dua hal yaitu: pertama, menjalin hubungan kerja sama dengan negara-negara lain khususnya negara-negara tetangga yang berada di sekitarnya. Kedua, menciptakan dukungan seluruh elemen yang terdapat di dalam negeri.⁶⁰ Hal ini mudah dipahami karena dengan terjalinnya hubungan kerja sama dan terbentuknya loyalitas kepada negara di dalam negeri, maka potensi konflik yang dapat mengganggu keselamatan negara dapat dieliminasi. Dengan demikian keselamatan negara akan senantiasa terjaga.

Berkaitan dengan kedudukan dan tugas raja, Mangkunagara IV menandakan, bahwa apabila raja tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, maka ia gagal dalam melaksanakan fungsinya sebagai wakil Tuhan yang semestinya harus mengayomi negara dan rakyatnya. Kegagalan raja dalam melaksanakan tugas akan menyebabkan hilangnya perasaan cinta dan sikap hormat rakyat kepada raja, yang pada akhirnya akan mengakibatkan berkurangnya kewibawaan raja dan me-

mudarnya kehormatan negara.⁶¹ Oleh karena itu, Mangkunagara IV mengingatkan kepada penggantinya agar tidak mabuk terhadap kewibawaannya sebagai raja, dan melaksanakan seluruh tugas dan kewajibannya dengan penuh perhatian dan tanggung jawab.⁶²

b. Pemikiran tentang Kedudukan, Tugas, dan Kewajiban Punggawa

1). Kewajiban Hidup Punggawa

Sebagai seorang pemimpin praja yang sebelumnya telah memiliki pengalaman dalam melaksanakan jalannya pemerintahan, Mangkunagara IV melihat adanya sikap mental dan perilaku para punggawa yang sebenarnya tidak cocok dengan kedudukannya, yang pada gilirannya akan menghambat pembangunan. Adapun beberapa perilaku dan sikap mental punggawa yang dapat menjadi penghambat pembangunan, adalah:

- Tidak memperhatikan *piwulang luhur* tentang pengabdian kepada negara dan hanya berpedoman kepada petunjuk-petunjuk yang tidak benar;
- Tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban karena tidak mempunyai pengetahuan dan penalaran yang baik;
- Mudah kecewa dan patah semangat;
- Tidak dapat diandalkan karena adanya keterbatasan;
- Tidak segera bertindak dan suka menunda pekerjaan;
- Menghambat kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
- Apabila diperingatkan tersinggung karena dianggap sebagai amarah;
- Suka menyalahkan orang lain.⁶³

Padahal, sebagai pemimpin praja ia sedang melakukan kebijakan-kebijakan pembangunan pemerintahan, perekonomian, dan kemiliteran yang tentunya membutuhkan aparatur negara yang memiliki perilaku dan sikap mental yang baik. Dengan latar belakang itulah Mangkunagara IV merasa perlu memformulasikan pemikirannya untuk memberikan petunjuk kepada punggawa, agar kebijakannya dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana.

Sehubungan dengan hal itu, ia menganjurkan agar punggawa untuk bercermin pada profesi sebagai prajurit. Dengan gaji yang tidak begitu besar dibandingkan dengan punggawa, mereka dapat bekerja dengan baik dan memiliki loyalitas yang tinggi. Hal yang demikian itu merupakan suatu bukti bahwa prajurit adalah orang yang mengetahui kewajiban hidup, menghayati ajaran hidup, dan menaati pranata hidup yang berlaku. Prajurit tidak hanya memberikan manfaat bagi dirinya sendiri, tetapi juga memberikan manfaat kepada negaranya.⁶⁴

Sesuai dengan kedudukannya, punggawa juga harus dapat melakukan keutamaan hidup seperti yang dilakukan oleh prajurit utama. Ia harus menjaga keluhuran raja yang ditunjukkan dengan kemampuannya dalam menjalankan pemerintahan dan menciptakan kemakmuran negara, serta menjaga keluhuran pribadinya.⁶⁵ Dalam hal ini Mangkunagara IV menerapkan prinsip yang berlaku dalam kehidupan orang Jawa, yaitu *sepi ing pamrih rame ing gawe*. Dalam prinsip itu terkandung pengertian, bahwa orang harus menjalankan kewajiban hidupnya sebagai manusia sesuai dengan kedudukannya dengan tidak mengutamakan kepentingan individualnya, tetapi lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dan keselamatan dunia.⁶⁶

Agabila punggawa tidak melaksanakan kewajiban hidupnya sebagai manusia di dunia, maka ia adalah orang yang tidak berbudi luhur. Mangkunagara IV menandakan bahwa punggawa yang tidak memahami kedudukan dan melaksanakan kewajiban hidupnya sebagai manusia merupakan hama yang merugikan masyarakat, bahkan menjadi orang yang tidak berguna dalam masyarakat. Maka dari itu, ia mengingatkan kepada para punggawa agar senantiasa berbuat baik sesuai dengan kedudukannya. Untuk menghindari berbagai kemungkinan yang dapat mencelakakan diri sendiri, punggawa harus mendekatkan diri dan memohon pengampunan kepada Tuhan Yang Maha Agung;⁶⁷ sebuah sikap yang merupakan manifestasi kesadaran orang Jawa, bahwa semua orang harus ingat kepada Tuhan, mempercayakan diri pada bimbingan-Nya, dan percaya kepada-Nya.⁶⁸

D) Tugas dan Kewajiban Punggawa

Menurut Mangkunagara IV, bahwa kedudukan sebagai punggawa yang telah diperoleh melalui perjuangan yang berat merupakan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, punggawa harus senantiasa mensyukuri nikmat yang telah diberikan-Nya dan harus tetap mempertahankan niatnya ketika akan mengabdikan diri kepada negara.⁶⁹

Punggawa adalah orang yang mendapatkan kepercayaan dari raja. Ia mendapatkan kemuliaan dari raja melalui pangkat dan jabatan yang diembarkannya. Ia juga memiliki kewibawaan karena berhak mengatur prajurit. Ia bertugas mengatur rakyat kebanyakan, baik yang berada di dalam praja (ibukota) maupun yang berada di desa-desa. Ia mendapatkan tanah *lungguh* dan berhak untuk memanfaatkan lahan

dan memiliki hasil bumi yang dibudidayakan di atas tanah *lungguh* itu.⁷⁰

Punggawa berkewajiban untuk melindungi rakyat, yaitu dengan menjamin keamanan dan ketentramannya. Ini mengingatkan kita pada isi *Serat Nitipraja* yang menganjurkan para pejabat kerajaan menciptakan perasaan aman bagi penduduk desa.⁷¹ Ia juga harus mendorong dan membimbing rakyat untuk mematuhi peraturan dan juga mengajar mereka cara-cara mencari nafkah, mengelola ternak, sawah, ladang, dan pekarangan agar mereka merasa betah bermukim di daerahnya.⁷² Selain itu, punggawa berkewajiban mendorong masyarakat desa agar bersedia membantu pemerintah dan setia kepada negara.⁷³

Punggawa juga berkewajiban membimbing prajurit dan rakyat untuk mengetahui hukum, budi bahasa, tata krama, perilaku yang baik, dan pengetahuan yang bermanfaat, yang dapat dijadikan sebagai pegangan dalam mencapai cita-cita.⁷⁴ Sebagai konsekuensinya, punggawa dituntut untuk mengetahui maksud dari kelima hal itu.

Punggawa wajib memberantas segala bentuk tindak kejahatan, ancaman, dan gangguan terhadap negara agar raja sebagai wakil Tuhan di dunia yang bertanggung jawab terhadap keamanan dan keselamatan seluruh negeri merasa senang.⁷⁵

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa seorang punggawa harus memiliki kesadaran yang mendalam, kesetiaan yang tinggi dan lebih mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi. Ia juga harus mampu membimbing, mengarahkan, dan mengerahkan segenap lapisan rakyat untuk mendukung program pemerintah. Di samping itu, untuk meningkatkan kualitas rakyat, ia juga berkewajiban untuk meningkatkan pengetahuan yang bermanfaat. Pemikiran Mangkunagara

IV ini, menunjukkan adanya kesamaan substansi dengan *Serat Nitipraja* yang memberikan perhatian pada pengabdian pejabat harus ditujukan kepada rakyat kecil. Pengabdian bukan semata-mata patuh kepada raja tetapi juga mengusahakan kesejahteraan rakyat.⁷⁶

Sebagai penegasan terhadap peranan yang harus dimainkan oleh punggawa, Mangkunagara IV mengatakan, bahwa suatu negara akan mencapai kebesaran dan memiliki kewibawaan di mata negara lain, apabila punggawa dengan dukungan seluruh komponen dalam negara, telah melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik sesuai dengan kebijaksanaan raja untuk mewujudkan kemakmuran negara.⁷⁷

Dari uraian di atas tampak bahwa Mangkunagara IV menekankan pentingnya tanggung jawab penuh dari para punggawa. Sebagai pemimpin, punggawa mempunyai tanggung jawab yang bulat dan memiliki kekuasaan penuh atas tugas yang diembannya. Mereka bertanggung jawab tidak hanya dalam persoalan penting-penting saja, tetapi juga dalam kebijaksanaan sehari-hari.

c. Pemikiran tentang Kedudukan dan Tugas Prajurit

1). Pemikiran Teknis Keprajuritan

- Kriteria Pemilihan dan Pemilahan Prajurit

Dari perjalanan karier dan perhatiannya yang besar dalam memajukan Legiun Mangkunagaran, tampak jelas bahwa Mangkunagara IV sangat memperhatikan tentang keamanan dan ketahanan praja Mangkunagaran. Mengingat prajurit merupakan suatu profesi yang bertanggung jawab dalam keamanan dan ketahanan sebuah negara, maka profesi ini tidak dapat disandang oleh sembarang orang. Oleh karena itu, menurut Mangkunagara IV dalam memilih

prajurit harus dilakukan secara selektif dengan menerapkan kriteria tertentu yang merupakan peraturan negara. Adapun pelaksanaannya diserahkan kepada *senapati* (panglima perang) yang antara lain bertugas untuk mencari orang yang dapat dijadikan sebagai prajurit.⁷⁸ Hal ini mudah dipahami karena dalam bidang keprajuritan *senapati* merupakan orang pertama di bawah raja, walaupun pangkatnya di bawah *patih*.⁷⁹ Mangkunagara IV menekankan pentingnya pemilihan prajurit secara selektif, karena menurut *Serat Panitisastra* seorang raja berkewajiban mengawasi tingkah laku prajurit dengan cermat.⁸⁰ Dengan kata lain, pemilihan prajurit secara selektif itu merupakan bagian awal dari pengawasan yang dilakukan oleh seorang raja.

Sehubungan dengan itu, Mangkunagara IV menjadikan aspek badaniah dan perangai fisik sebagai bahan pertimbangan dalam memilih prajurit. Seperti disebutkan dalam *Serat Wirawiyata*, ada tujuh hal yang perlu diperhatikan dalam memilih prajurit agar berhasil membentuk prajurit yang utama, yaitu: *naluri* asal-usul, tanah kelahiran, tidak cacat, bentuk tubuh, kesehatan, penampilan, dan kegemaran.⁸¹

Apabila ketujuh persyaratan itu telah terpenuhi, seseorang baru dapat diangkat menjadi prajurit yang mendapatkan kepercayaan dari negara dalam hal pertahanan dan keamanan negara. Oleh karena prajurit merupakan *abdi dalem* yang harus selalu siap dalam menjalankan tugas dan kewajiban, maka Mangkunagara IV memandang perlu bahwa orang-orang yang diterima menjadi prajurit, sebelumnya harus diperkenalkan tentang tugas dan kewajiban sesuai dengan bidangnya masing-masing, sehingga setelah diangkat menjadi prajurit, ia dapat menjalankan tugas dan ke-

wajibannya dengan baik untuk kepentingan negara.

Sehubungan dengan hal itu, Mangkunagara IV mengadakan pemilihan tugas sesuai dengan kondisi dan potensi dari masing-masing prajurit. Pemilihan itu didasarkan pada kecocokan antara bentuk tubuh prajurit dengan peralatan atau persenjataan yang digunakan.

Menurut Mangkunagara IV, orang yang memiliki tinggi badan sedang atau yang berbadan pendek kecil biasanya rampil, cekatan, tangkas, dan sigap. Ia juga mampu mengatasi segala persoalan dan situasi. Oleh karena itu ia cocok untuk memegang senjata. Orang yang badannya semampai kebanyakan kurang lincah, sebaiknya dipersenjatai dengan tombak karena jangkauan tangannya panjang. Orang yang berciri-ciri tubuh demikian juga dapat melompati selokan rintangan, pandai memasang tangga, dan mampu memanjat benteng *baluwari*. Orang yang berperawakan gagah agak pendek (*sadhepah*), tulang otaknya tampak menonjol lebih cocok disertai meriam. Prajurit yang memiliki tubuh seperti itu, dianggap lebih dapat mengarahkan meriam pada sasaran. Apabila meriam terjerebab di dalam lumpur, ia akan dapat mengusungnya, dan apabila kuda penarik meriamnya lumpuh, ia akan mampu menggantikannya. Orang yang berperawakan tinggi perkasa cocok untuk menjadi prajurit berkuda. Hal ini dilandasi oleh sebuah pemikiran bahwa orang yang berperangai demikian akan lebih mudah menunggang dan mengendalikan kuda daripada orang yang bertubuh pendek. Selain itu, ia akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menggunakan senjata pedang apabila berhadapan dengan musuh yang juga menunggang kuda. Orang yang berperawakan serba baik dan berkemampuan serba bisa dapat ditugasi di berbagai bidang,

karena memiliki banyak akal. Ia dapat membuat tenda-tenda peristirahatan, benteng pertahanan, dan jembatan. Selain itu, ia biasanya juga memiliki ketrampilan memanjat dan berenang.⁸²

- Profesionalisme Prajurit

Sebagai pemimpin yang telah memiliki pengalaman dalam bidang kemiliteran, Mangkunagara IV menekankan pentingnya profesionalisme seorang prajurit. Mengingat bertempur di medan perang merupakan tugas utama seorang prajurit, maka prajurit harus memiliki mentalitas keprajuritan yang tangguh, menguasai aturan kemiliteran, dan memiliki ketrampilan keprajuritan yang baik. Untuk itu, seorang prajurit harus memiliki bekal kemampuan teoretis dan praktik yang memadai, karena hal itu akan sangat menunjang tugas-tugas yang diembannya.⁸³

Berkaitan dengan profesionalisme seorang prajurit, Mangkunagara IV menyarankan kepada para *kawula* Mangkunagaran agar mereka yang secara fisik dan mental tidak memenuhi persyaratan sebagai prajurit, tidak usah menjadi prajurit karena akan merugikan negara. Kesombongan, ketidakdewasaan, merasa penting dan diperlukan adalah sikap mental yang perlu dihindari. Sebaliknya, keteguhan hati, kebulatan tekad, adalah sikap mental yang harus tertanam pada jiwa prajurit.⁸⁴

Profesionalisme prajurit berkaitan dengan kesiapan dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya yang mencakup penguasaan pengetahuan tentang taktik dan strategi perang. Untuk meningkatkannya perlu dilakukan pelajaran dan pelatihan yang memfokuskan pada seluk-beluk peperangan.⁸⁵

Kesiapan mental prajurit berhubungan dengan wawasan, semangat dan integritas prajurit. Prajurit harus mengetahui hukum yang berlaku di

lingkungan profesinya dan dalam peperangan. Prajurit yang berhasil menumpas para perusuh layak diberi penghargaan sesuai dengan pengabdian-nya, sebaliknya bagi prajurit yang melakukan makar berontak, melanggar disiplin, desersi layak diberi hukuman yang setimpal dengan pelanggaran-nya. Apabila melakukan kesalahan yang berat dapat diberi hukuman yang berat termasuk hukuman mati.⁸⁶

- Unsur-unsur Pendukung Prajurit

Mangkunagara IV berpendirian bahwa pasukan dapat dikatakan kuat apabila ada keterpaduan antara prajurit, perlengkapan, dan pendukungnya. Di samping memiliki ketrampilan dan kemampuan keprajuritan yang memadai, prajurit harus memiliki perlengkapan dan sarana pendukung yang memadai pula. Bertitik tolak dari pemikiran itu, maka perlu diadakan pemilahan bidang-bidang pendukung keprajuritan yang memiliki tugas pokok, yaitu mengadakan, memelihara, dan meningkatkan sarana dan prasarana yang diperlukan oleh pasukan, seperti pakaian, persenjataan, dan lain-lain.

Menurut Mangkunagara IV, unsur-unsur pendukung yang perlu dipersiapkan dalam bidang keprajuritan adalah: penjahit pakaian dan pemintal benang yang bertugas menyiapkan tempat-tempat senjata; *tukang samak* yang bertugas menyiapkan barang-barang yang dibuat dari kulit; pembuat barang dari tembaga dan *tukang marakas* bertugas menyiapkan berbagai perlengkapan prajurit; pembuat keris dan pembuat barang dari emas tugasnya menyiapkan senjata untuk bertempur; tukang besi dan tukang kayu bersama *mranggi* dan *kemasan* menyiapkan perbekalan pertempuran.⁸⁷

Perlu ditambahkan, Mangkunagara IV pada bagian akhir dari *Serat Wirawiyata* juga menyatakan tentang

pentingnya adanya cadangan perbekalan yang mencukupi. Mengingat bahwa tugas menjaga ketahanan negara harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan bahaya yang mengancam suatu negara tidak dapat diperkirakan sebelumnya, maka prajurit harus dilengkapi dengan perbekalan yang memadai. Cadangan yang dimaksudkan adalah persenjataan, obat-obatan, mesiu, dan sebagainya.⁸⁸ Perlengkapan dan sarana pendukung prajurit itu perlu dipersiapkan dengan baik, karena kesiapannya akan memberikan ketenangan bagi prajurit dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara.⁸⁹

Dari uraian di atas tampak bahwa dalam pemikiran Mangkunagara IV terkandung sebuah pemikiran tentang organisasi kemiliteran moderen. Hal ini dapat dipahami karena ia banyak bergaul dengan orang-orang Eropa dan telah memiliki pengalaman militer bertahun-tahun di Legiun Mangkunagaran yang *nota bene* merupakan sebuah korps keprajuritan Jawa yang diorganisasi secara moderen.

2). Pemikiran Etis Keprajuritan

- Kesetiaan kepada Raja, Negara, dan Janji Prajurit

Kesetiaan seorang prajurit ditunjukkan dari darma bakti, pengabdian, dan pengorbanannya kepada negara. Konsep kesetiaan kepada negara dan tanah air ini terkandung dalam *Serat Tripama* dengan menampilkan teladan sikap keprajuritan tiga tokoh wayang dalam wiracarita Arjunasrabahu, Ramayana, dan Mahabarata, yaitu Sumantri, Kumbakarna, dan Karna Basusena.⁹⁰

Ketiga tokoh pewayangan itu walaupun berbeda dalam status, peranan dan lingkungan sosial serta kedudukan kenegaraannya, ketiganya mempunyai persamaan yaitu membela tanah airnya (negara) dengan rasa penuh tanggung

jawab, dengan alasan yang berbeda-beda mengorbankan jiwa dan raganya. Masing-masing mendasarkan kewiraan, rela berkorban untuk menciptakan kedamaian dunia.

Melalui ketiga tokoh pewayangan itu, Mangkunagara IV bermaksud menampilkan sosok prajurit sejati. Ia memandang bahwa sosok prajurit sejati terdapat dalam gabungan dari ketiga tokoh pewayangan itu. Tokoh Sumantri merupakan sosok prajurit yang berbakti dan sangat loyal kepada rajanya. Kumbakarna adalah sosok prajurit yang rela berkorban demi kelestarian dan keutuhan bangsa dan negaranya. Karna Basusena adalah profil prajurit yang setia terhadap janjinya, yang rela berkorban demi seseorang yang telah memberikan kedudukan kepadanya.⁹¹

Mangkunagara IV menyadari bahwa ketiga tokoh dalam *Serat Tripama* tersebut memiliki kelemahan. Namun ketiganya pantas dijadikan teladan sebagai suatu sikap keprajuritan.⁹² Mangkunagara IV menekankan perlunya sifat-sifat seperti itulah yang harus dimiliki oleh prajurit sejati. Walaupun demikian, ia juga menyadari bahwa manusia memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, ia memberi toleransi kepada prajurit agar mencontoh yang pantas dicontoh saja.

- Etika dalam Peperangan

Berkaitan dengan etika dalam peperangan, Mangkunagara IV membagi sikap keprajuritan menjadi tiga, yaitu *nistha*, *madya*, *utama*. Prajurit dikatakan nista apabila dalam suatu peperangan dengan persenjataan yang telah disiapkan, kekuatan di antara pihak yang bertikai seimbang, dan tidak ada korban, ia mundur dari medan peperangan karena ketakutan. Hal itu merupakan perbuatan nista karena telah membuat tiga kesalahan besar. Pertama, bersalah kepada raja karena ingkar janji. Kedua,

merendahkan martabat negara yang telah memberikan kemuliaan. Ketiga, berdosa kepada Tuhan.⁹³ Selain itu, dalam sebuah peperangan, jika ada musuh menyerah dengan meletakkan senjata hendaklah ditawan. Ia tidak boleh menganiaya musuh dengan sewenang-wenang apalagi membunuhnya. Apabila dilakukan, hal itu merupakan tindakan nista prajurit dan dapat menjatuhkan martabatnya.⁹⁴

Sementara itu, prajurit dikatakan utama apabila diserang musuh ia tetap tegar dan senantiasa meningkatkan kewaspadaan, mencermati medan peperangan untuk mencari celah-celah kelemahan musuh, dan merencanakan strategi penyerangan balasan untuk mencapai kemenangan.⁹⁵

Di antara keutamaan dan kenistaan itu, Mangkunagara IV menyebutkan adanya perilaku yang dapat digolongkan pada tingkat di antara keduanya (*madya*, tengah), yaitu apabila dalam sebuah peperangan prajurit terdesak oleh musuh dengan kekuatan yang seimbang, ia mundur dengan penuh kewaspadaan untuk mengatur siasat. Apabila musuh menyerang ia segera melakukan serangan balik dan melumpuhkannya.⁹⁶

Pemikiran tentang keprajuritan yang dituangkan dalam *serat piwulang* itu merupakan suatu usaha pembinaan mental keprajuritan yang selalu diusahakan perkembangannya di praja Mangkunagaran. Hal ini mudah dipahami karena Mangkunagaran merupakan satu-satunya istana yang masih memelihara tradisi militer bangsawan Jawa, meskipun di bawah kekuasaan Belanda. Legiun Mangkunagaran, yang terdiri atas pasukan infantri, kavaleri, dan artileri tetap dipertahankan dengan dukungan keuangan Belanda.⁹⁷

IV. SIMPULAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemikiran Mangkunagara IV tentang ketataprajaan yang terdapat dalam *serat-serat piwulang* memberikan perhatian pada tiga unsur utama dalam sebuah negara, yaitu raja, punggawa, dan prajurit, yang masing-masing menekankan pada kedudukan, tugas, dan kewajibannya. Pemikiran itu sebagai manifestasi dari tugas pemimpin praja yang harus bertanggung jawab terhadap jalannya pemerintahan, yang kemunculannya bersamaan dengan penerintahan, perekonomian, dan kemiliteran yang dilakukan oleh

Mangkunagara IV. Dengan kata lain, pemikiran itu merupakan landasan etis dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Mangkunagara IV, agar kebijakan-kebijakan itu mendapatkan dukungan dari seluruh komponen dan eksponen yang terdapat di dalam praja Mangkunagaran, khususnya para *santana*, *narapraja*, dan prajurit, serta mereka dapat melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan kedudukan, tugas, dan kewajibannya. Dengan demikian, cita-cita Mangkunagara IV untuk mewujudkan kerajaan Mangkunegaran yang mandiri sejajar dengan Kasunanan Surakarta dapat diwujudkan.

CATATAN

¹Sartono Kartodirdjo, dkk., *Sejarah Nasional Indonesia IV* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1976), hlm. 1.

²M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*. Terjemahan oleh Dharmono Hardjowidjono (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991), hlm. 149.

³*Ibid.*, hlm. 175.

⁴Darsiti Soeratman, *Kehidupan Dunia Keraton Surakarta* (Yogyakarta: Taman Siswa, 1989), hlm. 178.

⁵Th. Tigeaud, *Literature of Java I* (The Hague: Martinus Nijhoff, 1967), hlm. 235.

⁶A. Sudewa, *Serat Panitisastra* (Yogyakarta: Duta Wacana University Press, 1991), *passim*.

⁷Claire Holt, "The Development of the Art of Dancing in the Mangkunagaran", dalam *Het Triwindoegedenboek Mangkoe Nagoro VII* (1939), hlm. 251-252.

⁸V.J.H. Houben, "The Position of Mangkunegaran within the Partitioned Political Structure in Central Java", dalam C.D. Grijns dan S.O. Robson, ed., *Cultural Contact and Textual Interpretation* (Holland: Foris Publications, 1986), hlm. 186-187.

⁹G.J.W. Drewes, "Ranggawarsita the Pustaka Raja Madya and Wayang Madya", dalam *Orient Extremus* (1974), hlm. 199.

¹⁰Th. Pigeaud, "Pangeran Adipati Arja Mangkoenagara IV als Dichter", dalam *Djawa* (1927), hlm. 238.

¹¹Gilbert J. Garraghan. *A Guide to Historical Method*. (New York: Fordham University Press, 1957), hlm. 33.

¹²"Kangdjeng Goesti Pangeran Adipati Arja Mangkoenagara I-VII hing Soerakarta Hadiningrat", Reksa Pustaka Mangkunagaran Surakarta M.N. 78, hlm. 6-7.

¹³"Titimangsa Wigati ing Sejarah Mangkunegaran". Reksa Pustaka Mangkunagaran Surakarta M.N. 144, hlm. 73.

²⁴Pustaka Pemutan Lalampahanipun Ruler Mas Hario Gondokoesoemo, Peta ing Ngadiwidjajan ingkang Sapsan, saking Garwa Padmi angka 7 saking Pambadjengipun, ingkang Wewenang Djumeneng Kangdjeng Gusti Pangeran Hadipati Hario Mangkoenagoro ingkang kaping IV". Reksa Pustaka Surakarta Mangkunagaran M.N. 386, hlm. 1.

²⁵*Ibid.*

²⁶Sujanareja, *Serat Wedhatama Winardi* (Kediri: Tan Khoen Swie, 1937), hlm. 34-35.

²⁷Sartono Kartodirdjo, dkk., *Perkembangan Peradaban Priyayi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1987), hlm. 89-90.

²⁸Titimangsa Wigati ing *Sejarah Mangkunegaran*", *op. cit.*, hlm. 74.

²⁹Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunagara ingkang kaping IV (Solo: Sadhu, 1936), hlm. 4-5.

³⁰Pigeaud (1927), *op. cit.*, hlm. 239.

³¹*Serat Sujarah Dalem Mangkunagaran* (Surakarta: Swastika, Pasar Pon, 1922), hlm. 23.

³²J. Kats, *Toelichting bij Javaansche Bloemlezing I* (Batavia: Visser & Co, 1934), hlm. 10-13.

³³Tentang pengangkatan Pangeran Riya menjadi Mangkunagara III, lihat *Acte van Verband van Mangkoenagara III* dalam Moh. Dalijana, *Het Staatsrecht van het Mangkoenagarase Rijk, Bijlage III* (Mangkoenagaran, 1939), hlm. 111.

³⁴*Ibid.*, hlm. 50.

³⁵Prins Mangkoenagoro", dalam *De Locomotief*, 2 September 1881. Lihat juga "Titimangsa Wigati ing *Sejarah Mangkunegaran*", *op. cit.*, hlm. 76.

²⁶*Geheim Besluit van den 8 Maart 1853 No. Ia. L.*, M.N. IV No. 12A dan 93 Reksa Wilapa Mangkunagaran Surakarta. Lihat juga *Algemeen Verslag van de Residentie Soerakarta (AVRS) 1853*. Arsip Surakarta No. 132, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

²⁷*Politiek Verslag van de Residentie Soerakarta (PVRS) 1857*. Arsip Surakarta No. 113, ANRI. Lihat juga *Serat Babad ing Mangkoenagara*. Reksa Pustaka Mangkunagaran Surakarta M.N. 1785., hlm. 155. Tentang pemberian pangkat kolonel dan wewenang yang dimilikinya, lihat *Besluit 6 April 1860, Arsip Algemeen Secretarie Reel No. 66*, ANRI.

²⁸*Tataning Pagaweyan kang tumrap marang Para Abdi Dalem Sajroning Kutha Mangkunagaran*, Reksa Wilapa Mangkunagaran Surakarta M.N. IV No. 13.

²⁹Wasino, "Kebijaksanaan Pembaharuan Pemerintahan Praja Mangkunegaran: Studi tentang Strategi Pemerintahan Tradisional dalam Menghadapi Perubahan Sosial (Akhir Abad XIX – Pertengahan Abad XX)". Tesis Sarjana S-2 Sejarah Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, 1994, hlm. 107.

³⁰A.K. Pringgodigdo, *Geschiedenis der Ondernemingen van het Mangkoenagorosche Rijk* ('S-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1950), hlm. 44.

³¹Vincent J.H. Houben, "Economic Policy in Principalities of Central Java in the Nineteenth Century", dalam Angus Maddison, et al., ed., *Economic Growth in Indonesia 1820-1940* (Holland: Foris Publication, 1986), hlm. 191.

- ³²S. Margana, "Perubahan Kedudukan Tanah Apanage di Mangkunegaran pada Masa Pemerintahan Mangkunegoro IV 1853-1881". Skripsi Sarjana Sejarah Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada, hlm. 136-137.
- ³³Pringgogidgo, *op. cit.*, hlm. 47.
- ³⁴Anonim, *Pangolah dan Panandure Kopi. Katulis dening Prentahing Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunagara IV* (Surakarta: Jaspers & Co, 1867), hlm. 2-12.
- ³⁵Pringgogidgo, *op. cit.*, hlm. 43.
- ³⁶*Ibid.*, hlm. 46.
- ³⁷PVRS 1863, Arsip Surakarta No. 119, ANRI.
- ³⁸Pringgogidgo, *op. cit.*, hlm. 49.
- ³⁹Houben, *op. cit.*, hlm. 187.
- ⁴⁰AVRS 1859, Arsip Surakarta No. 133, ANRI.
- ⁴¹AVRS 1859, Arsip Surakarta No. 133, ANRI.
- ⁴²AVRS 1863, Arsip Surakarta No. 134, ANRI.
- ⁴³*Penget, Iki Layang Ingsun Parentah, Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunagara kang kaping Pat, Ridder saka Orde Nederlansche Leeuw, kang Jumeneng Kolnel Komandhan saka Lesiyun Ingsun ing Surakarta, Duma-wuha marang Pangeran Arya Gandakusuma, Litnan Kolnel Tweede Komandhan ing Lesiyun.* Reksa Wilapa Mangkunagaran Surakarta. M.N. IV No. 16.
- ⁴⁴Sarwanto Wiryasaputra, "Legiun Mangkunagara". (Solo: Reksopustoko Perpustakaan Istana Mangkunagaran, 1978), hlm. 15.
- ⁴⁵Tentang tata krama prajurit Mangkunagaran lihat *Papacak marang Sarupa-ning Abdi Dalem Militer Legiun Mangkunagaran*, Reksa Pustaka Mangkunagaran Surakarta M.N. 883.
- ⁴⁶"Over de Etiquette van den Legioen-officier", Reksa Pustaka Mangkunagaran Surakarta M.N. 880.
- ⁴⁷Tentang undang-undang ini lihat Arsip Reksa Wilapa Mangkunagaran Surakarta M.N. IV No. 78.
- ⁴⁸*Serat Laksitaraja*, No. A 192 Reksa Pustaka Mangkunagaran Surakarta, *Tembang Kinanthi* bait ke-4.
- ⁴⁹*Ibid.*, bait ke-32.
- ⁵⁰Soemarsaid Moertono, *Negara dan Usaha Bina-Negara di Jawa Masa Lampau*. Terjemahan Yayasan Obor (Jakarta: Yayasan Obor, 1985), hlm. 45.
- ⁵¹*Serat Laksitaraja*, *op. cit.*, bait ke-5.
- ⁵²*Ibid.*, bait ke-6
- ⁵³*Ibid.*, bait ke-30 dan 31. bait ke- 12, dalam *Serat-serat Anggitan Dalem Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunagara IV*, Jilid 3 (Jakarta: Kolff, 1953), hlm. 95.
- ⁵⁴*Ibid.*, bait ke-9 dan 10.
- ⁵⁵*Ibid.*, bait ke-19 dan 20.
- ⁵⁶*Ibid.*, bait ke-11 dan 12.
- ⁵⁷*Ibid.*, bait ke-15 dan 16.
- ⁵⁸*Serat Laksitaraja*, *op. cit.*, bait ke-21 dan 22.
- ⁵⁹Soemarsaid Moertono, "Budi dan Kekuasaan dalam Konteks Kesejarahan", dalam Miriam Budiardjo, ed., *Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa* (Jakarta: Sinar Harapan, 1986), hlm. 154.
- ⁶⁰*Serat Laksitaraja*, *op. cit.*, bait ke-27 dan 28.
- ⁶¹*Ibid.*, bait ke-32.
- ⁶²*Ibid.*, bait ke-33.

- ⁶³“Nayakawara”, *Pupuh Pangkur* bait ke- 2-4, dalam *Serat-serat Anggitan Dalem Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunagara IV*, Jilid 3 (Jakarta: Kolff, 1953), hlm. 41.
- ⁶⁴*Ibid.*, bait ke- 14 dan 15, hlm. 45.
- ⁶⁵*Ibid.*, bait ke- 17, hlm. 46
- ⁶⁶Franz Magnis-Suseno, *Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa* (Jakarta: Gramedia, 1999), hlm. 145-147.
- ⁶⁷“Nayakawara”, *op. cit.*, bait ke- 20, hlm. 47.
- ⁶⁸Magnis-Suseno, *op. cit.*, hlm. 140.
- ⁶⁹“Nayakawara”, *Pupuh Dhandhanggula* bait ke- 1-2, *op. cit.*, hlm. 47-48.
- ⁷⁰*Ibid.*, bait “Darmawasita”, *Pupuh Dhandhanggula* bait ke- 3, hlm. 49.
- ⁷¹Sudewa, *op. cit.*, hlm. 223-229.
- ⁷²“Nayakawara”, *op. cit.*, bait ke- 4, hlm. 49.
- ⁷³*Ibid.*, bait ke-5, hlm. 49.
- ⁷⁴*Ibid.*, bait ke- 5, hlm. 50.
- ⁷⁵*Ibid.*, bait ke- 11, hlm. 53.
- ⁷⁶Sudewa, *op. cit.*, hlm. 227.
- ⁷⁷“Nayakawara”, *op. cit.*, bait ke- 12, hlm. 53.
- ⁷⁸“Wirawiyata”, *Pupuh Pangkur* bait ke-1 dalam *Serat-serat Anggitan Dalem Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara IV*, Jilid 3 (Jakarta: Kolf, 1953), hlm. 26.
- ⁷⁹Darsiti Soeratman, *op. cit.*, hlm. 7.
- ⁸⁰Sudewa, *op. cit.*, hlm. 58.
- ⁸¹“Wirawiyata”, *op. cit.*, bait ke- 2 dan 3 hlm. 27.
- ⁸²*Ibid.*, bait ke- 5-9, hlm. 28-29.
- ⁸³*Ibid.*, *Pupuh Sinom* bait ke-21 dan 22, hlm. 17.
- ⁸⁴*Ibid.*, bait ke- 24, 28, 29, hlm. 18-20.
- ⁸⁵*Serat Laksitaraja*, *op. cit.*, bait ke- 25.
- ⁸⁶*Ibid.*, bait ke- 26.
- ⁸⁷“Wirawiyata”, *op. cit.*, hlm. 29-30.
- ⁸⁸*Ibid.*, hlm. 30.
- ⁸⁹*Serat Laksitaraja*, *op. cit.*, bait ke-25.
- ⁹⁰“Tripama”, dalam *Serat-serat Anggitan Dalem Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunagara IV* (Surakarta: Java Institut, 1934), hlm. 3-6.
- ⁹¹Boedihardjo, “Kritische Beschouwing van de Tripama”, dalam *Djawa* 15 (1935).
- ⁹²Moeljoto dan Endang Siti Saparinah, “Ajaran Mangkunegara IV dalam Tinjauan Filsafati”, Makalah Sara-sehan 125 Tahun Reksa Pustaka Mangkunagaran Surakarta 1992.
- ⁹³“Wirawiyata”, *op. cit.*, *Pupuh Sinom* bait ke- 39, hlm. 24-25.
- ⁹⁴*Ibid.*, bait ke- 37, hlm. 24.
- ⁹⁵*Ibid.*, bait ke- 42, hlm. 26.
- ⁹⁶*Ibid.*, bait ke- 41, hlm.25-26.
- ⁹⁷Ricklefs, *op. cit.*, hlm.196.